

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH PEDALAMAN DI KECAMATAN MALINAU SELATAN KABUPATEN MALINAU

Royanto¹, Adam Idris², Nur Fitriyah³

¹Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul

^{2,3}Magister Administrasi Publik FISIP Unmul

Alamat Korespondensi: jurnal.paradigma.mianunmul@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to know how the Implementation of Infrastructure Development in Acceleration of Development of Inland Region in Kecamatan Malinau Selatan Malinau District. This research uses descriptive research and will be analyzed by using inductive approach method. From the results of the research, Implementation of Infrastructure Development in Acceleration of Rural Development in Kecamatan Malinau Selatan has been running well, from year to year, there is a significant change but still needed sustainable development.

Keywords: Infrastructure, Development, Acceleration

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Percepatan Pembangunan Daerah Pedalaman, di Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif dan akan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan induktif. Dari hasil penelitian, Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Percepatan Pembangunan Daerah Pedalaman di Kecamatan Malinau Selatan telah berjalan dengan baik, dari tahun ke tahun terlihat adanya perubahan yang signifikan namun masih tetap diperlukan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Infrastruktur, Pembangunan, Percepatan

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur dalam rangka upaya memperkuat landasan bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi. Disisi lain pembangunan infrastruktur akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran. Selama ini, Pemerintah telah berupaya dalam rangka meningkatkan pembangunan baik waktu, tenaga dan pembiayaan untuk pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Hasil pembangunan dapat dilihat diseluruh wilayah Indonesia meskipun terdapat ketimpangan yang menunjukkan adanya perbedaan kecepatan pembangunan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Telihat ketimpangan yang cukup besar antar daerah, seperti halnya pada daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Salain itu Provinsi Kalimantan Utara merupakan Provinsi baru yang dalam tahap proses pembangunan.

Mencermati permasalahan tersebut maka perlu dilakukan suatu kajian yang lebih mendalam sehingga dapat diketahui secara jelas pentingnya pembangunan infrastruktur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh Karena itu, maka perlu strategi dalam mempercepat laju pertumbuhan dan pembangunan sehingga terdapat keselarasan antara pembangunan infrastruktur dengan sektor lainnya.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk investasi yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi, baik skala regional maupun nasional. Pembangunan infrastruktur merupakan determinan penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, karena mempunyai fungsi sebagai sarana untuk memperlancar dan mendukung kehidupan masyarakat serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya daerah pedalaman.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk meneliti implementasi pembangunan infrastruktur dalam percepatan pembangunan daerah pedalaman di Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau.

Kerangka Konsep dan Teori

Implementasi Kebijakan

Menurut Syauckani,dkk (2004:295) Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

George Edward III, mengemukakan bahwa implementasi adalah sebagai tahap pembuatan kebijakan diantara penetapan suatu kebijakan seperti tahap hukum, legislative pengeluaran eksekutif, penjatuhan keputusan pengadilan atau pengumuman, peraturan dan konsekuensi bagi individu yang terkait.

Menurut pendapat Daniel dan Paul Sabatier dalam Leo Agustino (2006:139) Implementasi Kebijakan sebagai Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2006:139) implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Model Implementasi Kebijakan

Dalam Implementasi kebijakan publik terdapat beberapa model kebijakan yang sering digunakan oleh para decision maker antara lain model top-down, model bottom up dan model sintesis. Pemahaman mengenai model kebijakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Model Top-Down (Shatier dan Mazmanian dalam sunarko, 2001)

Model kerangka analisis implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh kedua ahli ini disebut sebagai model top down karena suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan. Inti dari pemikiran Mazmanian dan Sabatier, melihat implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variable yaitu (1) karakteristik masalah (2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai aturan yang mengoperasionalkan kebijakan, (3) faktor-faktor di luar peraturan implementasi yang efektif memerlukan adanya perangkat kondisi

yang optimal, yaitu dimana para implementor harus memiliki keahlian secara profesional. Tidak mungkin implementasi bisa dilakukan jika kondisinya kurang optimal atau kurang ideal. Walaupun dalam model aslinya terpusat pada formulasi dengan implementasi, keunggulan implementasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, signifikan hubungan antara para aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan. Implementasi sangat tergantung pada tipologi pelaksana. Titik berat pada analisis hipotesis dan cara-cara untuk mencapai tujuan.

b. Model Bottom-Up (Thomas A. Smith)

Model Smith melihat proses kebijaksanaan dan perspektif perubahan sosial dan politik kebijakan pemerintah dibuat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat. Smith lebih lanjut mengemukakan adanya empat variable yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan,

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditemukan oleh banyak variable atau faktor dan masing-masing variable tersebut saling berhubungan satu sama yang lain. Menurut Edward III ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Empat faktor tersebut antara lain faktor *communication*, *resources*, *disposition* dan *bureaucratic structure*.

Teori Pembangunan

Pembangunan adalah proses perubahan berbagai dimensi kehidupan manusia yang berlangsung terus menerus. Perubahan ini bisa terjadi dengan sendirinya (*self-sustaining process*) bisa juga dengan pengaruh atau arahan dari pemerintah (Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidja A.R,1990:1), selain itu menurut Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan yaitu sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa,negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)

Dalam rangka mempercepat pembangunan di suatu daerah harus didukung dengan berbagai faktor, diantaranya pembangunan infrastruktur. Todaro, 2000:218) bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran pengembangan dan perkembangan suatu daerah, karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai cenderung dalam proses pembangunan akan terhambat, bahkan hasilnya kurang optimal.

Dalam hal pembangunan infrastruktur di daerah terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan umum sangatlah penting dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan disuatu daerah yang aksesibilitasnya rendah. Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan terhadap infrastruktur

tersebut. terutama dapat dilihat dari aksesibilitas yang menghubungkan antar wilayah kewenangan, mobilitas ekonomi, transportasi dan lain sebagainya.

Pembangunan Daerah Pedalaman

Menurut lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia (2009), bahwa secara garis besar permasalahan pembangunan daerah pedalaman dan perbatasan mencakup berbagai masalah, baik kondisi geografis, topografi wilayah dan berbagai dimensi lokal berupa kemiskinan. Permasalahan yang berdimensi Nasional berupa kesenjangan sosial antara penduduk negeri sendiri dengan penduduk Negara tetangga. Serta pergeseran garis tapal batas, permasalahan berdimensi ekonomi yaitu belum berkembangnya komoditas unggulan yang sinergis dengan industry pengolahan sehingga mengakibatkan terjadinya penyelundupan dan permasaran yang berorientasi ke luar.

Disisi lain pentingnya infrastruktur bukan hanya untuk meningkatkan aksesibilitas pembangunan daerah pedalaman juga dapat mendukung peningkatan keserasian pertumbuhan antara daerah tentunya dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar daerah dengan mengembangkan potensi sesuai dengan kondisi daerah.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif dan akan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan induktif. Penelitian Deskriptif dimaksud untuk mendeskripsikan realitas sebuah peristiwa untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena yang terjadi di objek penelitian. Menurut Sugiyono (2004:11) metode deskriptif adalah “metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain”. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif.

Hasil dan Pembahasan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting sebagai penentu percepatan pembangunan, khususnya di Kecamatan Malinau Selatan. Karena itu pembangunan infrasrtuktur perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari Pemerintah.

Urgensi pembangunan infrastruktur yaitu sebagai penunjang kelancaran aktivitas masyarakat juga memperlancar penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan. Dilihat dari manfaatnya infrastruktur yang baik akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan peningkatan kesehatan dan sebagainya sehingga sudah selayaknya pembangunan infrastruktur menjadi prioritas dalam rencana pembangunan daerah.

Dalam upaya pembangunan daerah, terlebih dahulu yang perlu dipersiapkan adalah infrastruktur yang memadai, dengan adanya infrastruktur aksesibilitas dalam segala hal dapat dilaksanakan dengan mudah, efektif dan efesien .

Kecamatan Malinau Selatan merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Malinau yang tergolong daerah pedalaman. Secara umum kondisi infrastruktur yang ada di Kecamatan Malinau Selatan dapat dikatakan cukup memadai namun tetap perlu peningkatan kedepannya. Akses dari Ibu Kota Kabupaten menuju Kecamatan pada saat sekarang ini telah terbuka masyarakat tidak lagi menggunakan alat transportasi sungai melainkan transportasi darat (Mobil) sehingga dapat lebih memudahkan masyarakat dalam beraktifitas, meghemat tenaga, waktu dan biaya.

Pembangunan Prasarana Jalan

Pembangunan jalan merupakan prasarana yang sangat prinsip dalam menunjang kelancaran sarana transportasi sekaligus penggerak perekonomian masyarakat serta sebagai jalur bagi transportasi lokal. Karena itu sudah selayaknya pembangunan sarana jalan mendapat perhatian yang lebih besar, sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan akses dapat diwujudkan. Jika ditinjau dari nilai dan manfaat bahwa pembangunan sarana jalan akan membawa konsekuensi untuk menunjang kelancaran hubungan antar desa, maupun antar wilayah kecamatan dan sekitarnya.

Dengan maksud tersebut maka perlu ditunjang dengan sarana jalan yang memadai. Jika kondisi jalan kurang memadai, bukan hanya mengakibatkan suatu wilayah menjadi terisolir tetapi dapat menghambat aksesibilitas masyarakat. Bahkan menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan rasa aman bagi kehidupan warga masyarakat. Untuk mengetahui keadaan jalan di Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Fasilitas Jalan di Malinau Selatan

No	Fasilitas Jalan	Panjang Jalan (M)	Kondisi
		2017	
1	Jalan Aspal Kecamatan	11 KM	Sedang
2	Pemeliharaan/Perbaikan Jalan Malinau – Malinau Selatan	72 KM	Sedang
Jumlah		83 KM	

Dari data di atas menunjukkan bahwa pembangunan sarana jalan di kecamatan Malinau Selatan mengalami perubahan dari sebelumnya baik untuk pembukaan, perbaikan dan perawatan jalan. Kondisi ini bukan hanya penghubung antar ibu kota Kabupaten ke Kecamatan namun pula akses dari ibu kota kecamatan ke desa-desa sudah mengalami peningkatan yang sangat pesat.

Dengan dibangunnya jalan tersebut dapat merubah keadaan jalan di Kecamatan Malinau Selatan menjadi lebih baik. Dalam dua tahun terakhir ini, kecamatan Malinau Selatan mengalami kemajuan di bidang pembangunan prasarana jalan, dengan ditingkatkan fasilitas jalan maka aksesibilitas transportasi di

daerah tersebut, masyarakat merasa aman dan kegiatan masyarakat lebih lancar. Pembangunan jalan tersebut merupakan adanya peran kerjasama dari Pemerintah Daerah dan Perusahaan.

Pembangunan Sarana Ekonomi

Pembangunan bidang ekonomi dalam rangka pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat selalu terus ditingkatkan. Pembangunan ekonomi tidak hanya dengan menciptakan sistem regulasi yang mengatur mengenai sentra-sentra ekonomi dan perdagangan dilakukan, namun juga harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur ekonomi yang mampu mendukung proses perdagangan itu sendiri, terutama dalam masyarakat sehingga roda jalannya perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan sebaik-bainya.

Kecamatan Malinau Selatan merupakan pusat aktivitas pertambangan batu bara dimana daerah tersebut memiliki potensi alam yang luar biasa dan tempat bagi para warga masyarakat sekitar bekerja di Perusahaan. Kondisi seperti ini merupakan peluang besar bagi masyarakat yang berada di daerah tersebut, karena adanya kesempatan untuk menambah pendapatan masyarakat, serta dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk berusaha seperti membuka dagangan dan berjualan di pasar. Kebutuhan sembilan pokok merupakan kebutuhan utama bagi perusahaan setiap harinya perlu ada pasokan sembako dan sayur-sayuran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur bidang ekonomi seperti pasar yang ada sebagaimana yang dimasukkan dalam rencana program yang telah direalisasikan merupakan usulan yang dihimpun dari musyawarah oleh warga masyarakat dan aparat desa-desa menghendaki perlunya pembanguan pasar baik yang dipusatkan di Kecamatan Maupun di desa masing-masing di wilayah Kecamatan Malinau Selatan. Sebagai mana harapan pemerintah pembangunan infrastruktur bidang ekonomi dapat memberi kontribusi lebih dan adanya aktivitas perekonomian serta memperhatikan kondisi masyarakat yang berada di wilayah tersebut dengan dapat memanfaatkan dan memfungsikan pasar sebagai tempat transaksi konsumen dan produsen untuk berjualan dan berbelanja dari hasil pertanian dan perkebunan. Namun hal itu tidak seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah. Tetapi pemerintah terus berupaya mendorong dan membiasakan warga untuk berbelanja di pasar.

Pembangunan Infrastruktur ekonomi selalu mendapat penekanan dari pemerintah di samping infrastruktur lainnya. Oleh karena ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi ini erat kaitannya dengan urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, meskipun jalan, jembatan berhubungan sarana ekonomi masyarakat umum yang dimaksud adalah sarana dan prasarana pasar untuk kegiatan ekonomi.

Dari hasil penelitian dilapangan pada pembangunan sarana ekonomi untuk aktifitas kegiatan perekonomian rakyat penulis mengambil kesimpulan bahwa pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pasar sudah terbangun namun belum memiliki dampak positif bagi perekonomian masyarakat. hal ini dilihat dari belum difungsikan pasar tradisional dan pasar modern tersebut sebagaimana mestinya hal

ini disebabkan karena lokasi pasar yang kurang strategis jauh dari pemukiman masyarakat.

Pengawasan Pembangunan Infrastruktur

Dalam kegiatan pembangunan salah satu faktor yang paling penting adalah pengawasan, dengan adanya pengawasan maka dapat diketahui, kegiatan pembangunan tersebut sudah sesuai dengan rencana awal. Pengawasan hendaknya dilakukan sejak awal hingga akhir kegiatan pembangunan. Pengawasan yang dilakukan petugas pengawas baik yang berkenaan dengan pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan dan pembangunan dibidang ekonomi di Kecamatan Malinau Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan menunjukkan indikasi efektif. Soal pengawasan pembangunan Infrastruktur tersebut, telah melibatkan beberapa orang pengawas yang berasal dari instansi, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Perusahaan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa. Pengawasan penting agar semua kegiatan pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan rencana pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan terkait dengan pembangunan infrastruktur, dalam pembangunan pengawasan yang sudah dilakukan secara baik oleh pemerintah maupun instansi terkait dalam melakukan pengawasan dilakukan juga supervisi. Supervisi dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kegiatan pembangunan itu dilakukan dan untuk dipertanggungjawabkan.

Pengawasan pembangunan Infrastruktur melibatkan pengawas yang berasal seperti Dinas Pekerjaan Umum, DPRD, Perusahaan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa. Pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di kecamatan Malinau Selatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, atau sesuai petunjuk pelaksanaan kerja (Juklak). Dari hasil pengawasan tidak ditemukan tindakan yang menyimpang dari kontrak kerja, dan semua pekerjaan, baik yang berkenaan dengan pembangunan jalan dan pembangunan sarana prasarana bidang ekonomi, telah dilaksanakan sesuai rencana kerja yang dibuat dalam perencanaan.

Koordinasi antar Instansi Terkait

Koordinasi penting dilakukan agar semua kegiatan pembangunan infrastruktur dapat dicapai secara efektif. Koordinasi adalah suatu kegiatan untuk menyatupadukan dari berbagai unit/instansi agar terdapat kesamaan tindakan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Mengingat pembangunan infrastruktur di Kecamatan Malinau Selatan, melibatkan berbagai instansi terkait maka koordinasi harus dilakukan agar terdapat keselarasan dan keasamaan tindak antara pembangunan infrastruktur yang satu dengan yang lainnya dapat mencapai hasil yang efektif.

Dengan adanya koordinasi antar lembaga/instansi yang baik niscaya pembangunan infrastruktur, yang meliputi berbagai bidang kegiatan di Kecamatan Malinau Selatan dapat diselesaikan lebih efektif dan efisien. Disisi lain dengan membangun koordinasi merupakan sebagai suatu proses kegiatan untuk mengintegrasikan seluruh unsur pelaksana yang terlibat dalam pembangunan

infrastruktur dapat bekerja terintegrasi sehingga sasaran yang dibuat dalam rencana kerja dapat dicapai sesuai rencana.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh unsur pelaksana mampu menyelaraskan semua kegiatan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau dan mampu menyelaraskan kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan pihak swasta/Perusahaan.

Dengan koordinasi yang dibangun oleh unsur pelaksana ternyata semua program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Malinau Selatan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Faktor Pendukung

- a. Adanya Komitmen dan keseriusan Pemerintah dalam merealisasikan percepatan pembangunan di wilayah Malinau Selatan . Hal itu terlihat dari adanya kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Malinau dengan Pihak Perusahaan yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Malinau Selatan untuk pembangunan, peningkatan, perbaikan dan perawatan jalan dan jembatan dengan anggaran ± 130 Milyar khususnya jalan penghubung ibu Kota Kabupaten Malinau ke Ibu Kota Kecamatan Malinau Selatan dan wajib bagi Perusahaan untuk memelihara jalan.
- b. Adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan hal itu dapat dilihat dari peran aktifnya masyarakat dalam kegiatan musrenbang baik ditingkat desa sampai ke Kabupaten.

Faktor Penghambat

- a. Terbatasnya alokasi anggaran yang disetujui pihak pimpinan organisasi vertikal dan kondisi pemerintah daerah / nasional hingga saat ini dalam kondisi devisa.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan fungsi pembangunan infrastruktur yang disediakan oleh Pemerintah, sehingga pembangunan yang ada tidak terpelihara dengan baik dan tidak memberi kontribusi untuk masyarakat malinau selatan sehingga tidak maksimal.
- c. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang ekonomi masih dirasakan tidak tepat sasaran. Dikatakan tidak tepat sasaran dikarenakan pada saat perencanaan kurang matang dan sehingga pada saat pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan awal.
- d. Terdapatnya beberapa desa yang masih belum memiliki akses jalan sendiri. dalam hal ini desa-desa yang masih berada dilokasi tambang, sehingga untuk menuju desa tersebut masih menggunakan jalur tambang.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bagian sebelumnya, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pembangunan prasarana jalan di Kecamatan Malinau Selatan sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya akses jalan penghubung dari Kecamatan ke Kabupaten Malinau yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam melakukan aktifitasnya atau kegiatan masyarakat untuk memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Meskipun secara kualitas prasarana jalan yang ada belum memadai yaitu pada titik tertentu kondisi jalan yang kurang baik, namun disisi lain kegiatan pembangunan prasarana jalan seperti pemeliharaan, jalan terus dilakukan di Kecamatan Malinau Selatan.

Pembangunan sarana dan prasarana pasar untuk kegiatan ekonomi masyarakat sudah terbangun namun belum memiliki dampak positif bagi perekonomian masyarakat. hal ini dilihat dari belum difungsikannya pasar tradisional Long Loreh, Pasar Langap dan pasar baru Kecamatan Malinau Selatan tersebut sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan karena lokasi pasar yang kurang strategis jauh dari pemukiman masyarakat.

Pengawasan pembangunan infrastruktur telah dilakukan dengan efektif, pengawasan tersebut melibatkan pengawas yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, DPRD, Perusahaan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa. Pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Malinau Selatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, atau sesuai petunjuk pelaksanaan kerja (Juklak). Dari hasil pengawasan tidak ditemukan tindakan yang menyimpang dari kontrak kerja, dan semua pekerjaan, baik yang berkenaan dengan pembangunan jalan dan pembangunan sarana prasarana bidang ekonomi, telah dilaksanakan sesuai rencana kerja yang dibuat dalam perencanaan.

Koordinasi yang baik terarah dan efektif antar instansi terkait dilakukan oleh unsur pelaksana mampu menyelaraskan semua kegiatan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Malinau Selatan dan mampu menyelaraskan kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan pihak swasta sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan program pemerintah Daerah.

Faktor –faktor pendukung dan faktor penghambat pembangunan infrastruktur di kecamatan Malinau Selatan dalam percepatan pembangunan pedalaman diantaranya faktor pendukung meliputi; Komitmen dan keseriusan Pemerintah dalam merealisasikan percepatan pembangunan di wilayah Malinau Selatan, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam perencanaan pembangunan hal itu dapat dilihat dari peran aktif masyarakat dalam kegiatan musrenbang baik ditingkat desa sampai ke kabupaten. Sedangkan Faktor penghambat pembangunan infrastruktur diantaranya; Terbatasnya alokasi anggaran yang disetujui pihak pimpinan organisasi vertikal dan kondisi pemerintah daerah/nasional hingga saat ini dalam kondisi defisit. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan fungsi pembangunan infrastruktur yang disediakan oleh Pemerintah sehingga pembangunan yang ada tidak terpelihara dengan baik dan tidak memberi kontribusi untuk masyarakat Malinau Selatan.

Sesuai dengan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Koordinasi antar pemerintah dan stakeholder terkait perlu ditingkatkan lagi agar dalam pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik.
2. Perlu adanya pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi tentang pemanfaatan dan fungsi pembangunan yang telah disediakan oleh pemerintah
3. Perlu adanya perencanaan yang matang sebelum melaksanakan Pembangunan khususnya infrastruktur ekonomi (pasar). Pemilihan lokasi pasar hendaknya melihat dan mempertimbangkan kondisi kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press: USA.
- Siagian, SP. 1998. *Administrasi Pembangunan*. Cetakan Kesebelas. Gunung Agung: Jakarta
- Sugiono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi metode R & D*. Alfabeta: Bandung.
- Sunarko, Bambang. 2001. *Beberapa Pendekatan Riset Bioremediasi*. Pusat Penelitian Bioteknologi – LIPI No. 3 Vol. 15.
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Dalam Kesatuan*. Yogya Pustaka: Yogyakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES: Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid I. Edisi Keenam. Erlangga: Jakarta.